

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA****ZULKIPLI**

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

**ABSTRACT**

*The objective of this research is to see the relation of fiscal decentralisation with the growth of the Indonesian economy from year 2010 to 2014. The study uses panel data gathered from the Indonesian Ministry of finance and Indonesian Statistical Bureau (BPS) covering General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU), Specific Grant (Dana Alokasi Khusus/DAK) and Revenue-Sharing (Dana Bagi Hasil/DBH), and provincial Real Regional Gross Domestic Product (Produk Domestik Regional Bruto Riil/PDRB). Data is then analysed panel data analysis model. There are four variables taken into the equation. While PDRB is treated as dependent variable, DAU, DAK and DBH act as independent variables. Regional data are also grouped into three regional setting: (1) Sumatera, (2) Java, and Bali (3) Sulawesi, Kalimantan and Eastern Indonesia. The purpose of this categorisation is to see the statistical output differences resulted from these three examined regions. The research analysis shows that fiscal decentralisation has a positive influence on the economic growth. DAU and DBH have positively influenced the PDRB. On the other hand, DAK has a negative influence on PDRB. There are six regions that have positive heterogeneity. They are Jakarta, East Java, West Java, Middle Java, Banten and North Sumatera. It means that they have higher heterogeneity among others. The regions that have lowest heterogeneity are Riau Islands, Papua, West Papua, Maluku and East Nusa Tenggara. Finally, this research suggests that central government should guarantee the continuity of fiscal transfer to regions that have shown their fine performance in enhancing the local economic growth. At the same time, local governments should make a better use the use of fiscal transfers based on priority sectors in order to accelerate the growth of their local economy.*

**Key Words:** *Economic growth and Fiscal decentralisation*

**PENDAHULUAN**

Perdebatan dikalangan praktisi ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk senantiasa dikaji adalah mengenai keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan salah-satu indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua teori yang bertentangan dalam membahas masalah tersebut. Dalam Teori Konvensional (*Traditional Theory*) dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menimbulkan kesenjangan antar daerah, namun juga tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Sedangkan dalam Teori Perspektif Baru (*New Perspective Theory*) menilai bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan mereduksi kesenjangan antar daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam belanja publik dan sebagai sebuah sistem yang tepat untuk menutupi kegagalan perencanaan pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal juga dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*). Di Asia Timur, kecenderungan pelaksanaan desentralisasi fiskal hampir terjadi di seluruh negara. (Devas, 2006).

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara nyata dimulai pada Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebelum era desentralisasi di Indonesia kondisi keuangan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Pada Tahun 1968 hanya sekitar 7 persen dari total penerimaan nasional yang didistribusikan ke daerah, kondisi ini berlanjut hingga 20 tahun kemudian. Dalam masa Tahun 1990-an, Pemerintah Pusat hampir menguasai 90 persen dari penerimaan negara dan hanya 10 persen yang ditransfer ke daerah. Sehingga sistem keuangan Indonesia pada saat itu termasuk dalam kategori yang sangat buruk yang ditandai oleh ketidakseimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Widhiyanto, 2008: 30).

Semenjak sistem desentralisasi fiskal dijalankan pada Tahun 2001, posisi keuangan daerah semakin membaik dibandingkan era sebelumnya. Pada Tahun 2005 atau setelah lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, distribusi pengeluaran pemerintah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi relatif seimbang, yaitu sebesar 32.6 persen dari total pengeluaran nasional didistribusikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan (World Bank, 2006: 250).

Penelitian ini berusaha untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan rumusan masalah adalah berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 sampai 2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 sampai 2014.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep dan Pengertian Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit di bawahnya dalam bidang politik, fiskal dan kekuasaan atau kewenangan administrasi. Desentralisasi akan memperkuat eksistensi pemerintah dan memperluas sumber-sumber penerimaan pemerintah, karena sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pemerintahan yang lebih rendah. (Sidik dkk, 2002).

Jenis bantuan pusat kepada daerah dibagi dua, pertama bantuan umum (*general grants*) yaitu dana transfer dari Pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai aktifitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang penggunaannya sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Kedua bantuan khusus (*categorical grants*) yaitu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang penggunaannya untuk membiayai proyek tertentu dan pemerintah pusat berhak untuk mengontrol penggunaan dana atau menentukan tujuan dari penggunaan dana tersebut (Holcombe, 2006)

Pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemerintah pusat. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakatnya dapat menimbulkan efisiensi dalam pelayanan baik dari segi waktu dan dana. Sehingga pelayanan publik yang diberikan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat daerahnya (Wibowo, 2008)

### **Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal memang diyakini oleh para ahli akan mempunyai suatu efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diakui bahwa dasar teoritis yang menjelaskan hubungan kedua hal tersebut saat ini masih dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan para ahli. Bahkan, apakah desentralisasi fiskal berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau melalui efek efisiensi juga

masih menimbulkan jawaban yang bervariasi. Beberapa ahli yang pendukung konsep ini adalah Tiebout (1961), Musgrave (1969), Oates (1972) Prud'homme (1995), Tanzi (1996), Ter-Minassian (1997), Devas (2006) dan Hyman (2008)

Lebih lanjut Ter-Minassian (1997) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal secara luas dalam pengeluaran publik secara signifikan dapat mempengaruhi ekonomi secara makro. Setiap perubahan dalam komposisi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah daerah akan mempengaruhi permintaan agregat dan stabilisasi, misalnya jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah secara relatif akan mempengaruhi permintaan agregat di tingkat daerah, peningkatan permintaan agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dapat mempengaruhi tingkat harga.

Feltenstein dan Iwata (2005) melakukan penelitian di China mengenai pengaruh desentralisasi terhadap kinerja ekonomi makro selama Tahun 1952 sampai 1996. Data yang digunakan adalah data produk domestik bruto, inflasi dan data indikator desentralisasi yang mencakup indikator desentralisasi ekonomi dan desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan *Vector Autoregressive Model* (VAR) penelitian itu berhasil menunjukkan terdapat hubungan positif antara desentralisasi dengan kinerja ekonomi makro. Desentralisasi ekonomi dan desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun fiskal memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat inflasi.

Selanjutnya Wibowo (2008) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan daerah selama periode 1999 sampai 2004 dengan menggunakan data 29 provinsi. Adapun data yang digunakan adalah PDRB perkapita, jumlah penduduk, rasio investasi terhadap PDB, rasio sumber daya manusia dan perdagangan internasional yang secara luas telah diakui sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga menggunakan beberapa data indikator desentralisasi fiskal. Model regresi utama yaitu, regresi atas kontrol variabel, regresi kontrol variabel dengan variabel dummy, regresi penuh yang menggabungkan kontrol variabel dengan indikator desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat pengujian hubungan antara variabel desentralisasi fiskal/dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai 2014. data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Provinsi seluruh Indonesia sebagai variabel terikat. Selain itu juga menggunakan data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai variabel bebas.

## Model Analisis

Untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan alat ukur analisa data panel. Adapun persamaan umum panel data adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + U_i \quad (1)$$

yang dapat diubah menjadi,

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_i \quad (2)$$

$Y_i$  = PDRB riil di Provinsi  $i$

$\beta_1$  = Konstanta

$i$  = Konstanta dari tiap-tiap unit kerat silang (*cross-section unit*)

$\beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi

- DAU<sub>it</sub> = Jumlah Dana Alokasi Umum di Provinsi i selama periode t  
 DAK<sub>it</sub> = Jumlah Dana Alokasi Khusus di Provinsi i selama periode t  
 DBH<sub>it</sub> = Jumlah Dana Bagi Hasil di Provinsi i selama periode t  
 ei = error terms.

Selanjutnya data dikelompokkan dalam tiga wilayah yaitu, (1) Wilayah Sumatera yang mencakup sepuluh provinsi. (2) Wilayah Jawa dan Bali yang mencakup tujuh provinsi. (3) Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur yang mencakup enam belas provinsi. Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 33 provinsi. Data yang digunakan selama periode 2010-2014, sehingga terdapat 165 observasi selama periode tersebut. Adapun untuk mengetahui model estimasi yang sesuai dilakukan *Redundant Test* dan *Hausman Test*, sehingga diketahui apakah estimasi *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang sesuai untuk penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal atau pelimpahan keuangan dan urusan perpajakan dari pemerintah pusat ke daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selama periode penelitian yaitu Tahun 2010-2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui analisa panel data untuk semua propinsi di Indonesia. Dari hasil pengujian *Redundant test* dan *Hausman test* diketahui bahwa model yang sesuai untuk estimasi adalah model *fixed effect*.

Tabel 4.1  
 Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap  
 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Sample: 1 5  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 33  
 Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU?	4.934594	0.976177	5.055021	0.0000
DAK?	-13.22402	5.929367	-2.230257	0.0275
DBH?	2.526277	0.564357	4.476380	0.0000
C	30509438	2259706.	13.50151	0.0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995192	Mean dependent var	49593182
Adjusted R-squared	0.993888	S.D. dependent var	78219909
S.E. of regression	6115251.	Akaike info criterion	34.28070
Sum squared resid	4.82E+15	Schwarz criterion	34.95836
Log likelihood	-2792.158	Hannan-Quinn criter.	34.55579
F-statistic	762.9373	Durbin-Watson stat	1.028015
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Analisa Panel Data Provinsi di Indonesia.

Dari hasil estimasi panel data diatas dapat dianalisis berdasarkan koefisien koefisiennya sebagai berikut:

$$Y = 30509438 + 4,93 \text{ DAU} - 13,22 \text{ DAK} + 2,53 \text{ DBH} \quad (3)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Jika variabel DAU meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 4,93 (Dalam Juta Rupiah), dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DBH dianggap konstan.
2. Jika variabel DAK meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan turun sebesar 13,22 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DBH dianggap konstan.
3. Jika variabel DBH meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 2,53 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DAU dianggap konstan.

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau  $R_{\text{square}}$  pada variabel PDRB Riil adalah 0.99 yang berarti 99,5 % nilai PDRB Riil dipengaruhi oleh variabel independen (DAU, DAK dan DBH).

Hasil penelitian menunjukkan heterogenitas dari tiap-tiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Provinsi di Indonesia yang mempunyai heterogenitas positif adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti kelima provinsi tersebut yang mempunyai model estimasi dengan nilai konstan yang lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia. Sedangkan provinsi-provinsi lain mempunyai heterogenitas negatif, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi tersebut mempunyai model estimasi dengan nilai konstan yang lebih rendah dari rata-rata di Indonesia. Provinsi yang mempunyai nilai heterogenitas terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Hasil Estimasi untuk Wilayah Sumatera

Hasil penelitian untuk wilayah Sumatera menunjukkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB riil diseluruh provinsi dalam wilayah Sumatera.

**Tabel 4.2 Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera**

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled Least Squares  
Sample: 1 5  
Included observations: 5  
Cross-sections included: 10  
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU?	1.497414	0.878010	1.705463	0.0965
DAK?	4.160217	4.645907	0.895458	0.3763
DBH?	0.992806	0.285207	3.480998	0.0013
C	23276824	1624701.	14.32683	0.0000

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.995088	Mean dependent var	31351760
Adjusted R-squared	0.993495	S.D. dependent var	23928929
S.E. of regression	1929889.	Akaike info criterion	32.00272
Sum squared resid	1.38E+14	Schwarz criterion	32.49984
Log likelihood	-787.0680	Hannan-Quinn criter.	32.19203
F-statistic	624.6808	Durbin-Watson stat	1.528786
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

Sumber: Hasil Analisa Panel Data Wilayah Sumatera

Dari hasil penelitian diketahui bahwa model estimasi panel data tersebut dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya sebagai berikut:

$$Y = 23276824 + 1.50 \text{ DAU} + 4,16 \text{ DAK} + 0,99 \text{ DBH} \quad (4)$$

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:

2. Jika variabel DAU meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 1,50 (Dalam Juta Rupiah), dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DBH dianggap konstan.
2. Jika variabel DAK meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 4,16 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DBH dianggap konstan.
3. Jika variabel DBH meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 0,99 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DAU dianggap konstan.

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau  $R_{\text{square}}$  pada variabel PDRB Riil adalah 0.9950 yang berarti 99,5% nilai PDRB Riil dipengaruhi oleh variabel independen (DAU, DAK dan DBH).

#### Hasil Estimasi untuk Wilayah Jawa dan Bali

Dari tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa model estimasi panel data tersebut dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan estimasi panel data berdasarkan tabel di bawah ini adalah:

$$Y = 87990905 + 2,82 \text{ DAU} - 11,67 \text{ DAK} + 21,07 \text{ DBH} \quad (5)$$

**Tabel 4.3. Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali**

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled Least Squares  
Sample: 1 5  
Included observations: 5  
Cross-sections included: 7  
Total pool (balanced) observations: 35

---



---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87990905	8233408.	10.68706	0.0000
DAU?	3.817817	1.695661	2.251521	0.0334
DAK?	-11.66890	12.81724	-0.910406	0.3713
DBH?	21.07031	1.859210	11.33294	0.0000

---

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.998508	Mean dependent var	1.54E+08
Adjusted R-squared	0.997971	S.D. dependent var	1.18E+08
S.E. of regression	5305301.	Akaike info criterion	34.04127
Sum squared resid	7.04E+14	Schwarz criterion	34.48565
Log likelihood	-585.7222	Hannan-Quinn criter.	34.19467
F-statistic	1859.294	Durbin-Watson stat	2.851646
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Analisa Panel Data Wilayah Jawa Bali

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

1. Jika variabel DAU meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 2,82 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DBH dianggap konstan.
2. Jika variabel DAK meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan turun sebesar 11,67 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DBH dianggap konstan.
3. Jika variabel DBH ( $X_3$ ) meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 21,07 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DAU dianggap konstan.

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau  $R_{\text{square}}$  pada variabel PDRB Riil adalah 0.9985 yang berarti 99,85% nilai PDRB Riil dipengaruhi oleh faktor-faktor independen (DAU, DAK dan DBH).

#### Hasil Penelitian untuk Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur

Dari tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa model estimasi panel data tersebut dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya. Model persamaan estimasi panel data berdasarkan tabel di bawah ini adalah:

$$Y = 13279445 + 0,44 \text{ DAU} + 5,86 \text{ DAK} + 1,34 \text{ DBH} \quad (6)$$

Tabel 4.4. Hasil Estimasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled Least Squares  
Sample: 1 5  
Included observations: 5  
Cross-sections included: 16  
Total pool (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU?	-0.436006	0.459230	-0.949427	0.3461
DAK?	5.858018	2.255555	2.597152	0.0118
DBH?	1.336580	0.175787	7.603415	0.0000
C	13279445	738531.9	17.98087	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991093	Mean dependent var	15402288
Adjusted R-squared	0.988464	S.D. dependent var	13030086
S.E. of regression	1399481.	Akaike info criterion	31.34495
Sum squared resid	1.19E+14	Schwarz criterion	31.91068
Log likelihood	-1234.798	Hannan-Quinn criter.	31.57177
F-statistic	377.0766	Durbin-Watson stat	1.810413
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Analisa Panel Data Wilayah Indonesia Timur.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

1. Jika variabel DAU meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan turun sebesar 0,44 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DBH dianggap konstan.
2. Jika variabel DAK ( $X_2$ ) meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 5,86 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DBH dianggap konstan.
3. Jika variabel DBH ( $X_3$ ) meningkat Rp. 1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 1,34 (Dalam Juta Rupiah), dan dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DAU dianggap konstan.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) atau  $R_{\text{square}}$  pada variabel PDRB Riil adalah 0.9910 yang berarti 99,10% nilai PDRB Riil dipengaruhi oleh faktor-faktor independen (DAU, DAK dan DBH).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Desentralisasi fiskal di Indonesia mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dibuktikan melalui analisis model regresi linier berganda untuk tiga wilayah penelitian. Untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembuktian secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa provinsi yang sama-sekali tidak mendapat Dana Alokasi Khusus dalam beberapa tahun, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi antara lain, Pemerintah pusat harus menjamin kelangsungan transfer fiskal ke daerah, karena terbukti dana perimbangan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga dengan dana tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. Hari, (2005). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Jurnal Interdisipliner Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana: Surakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2009). Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi. BPS: Jakarta.
- Bank Indonesia, (2009). Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Vol. XI No. 7 BI: Jakarta.
- Davey, Kenneth, (1996). Urban Management: The Challenge of Growth. Avebury: Aldershot.
- Davoodi, H., Xie, D., dan Zou H. (1995). Fiscal Decentralization and Economic Growth in United States. Policy Research Department Working Paper. World Bank: Washington DC.
- Davoodi, H. dan Zou H., (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. Journal of Urban Economic Volume 43 Halaman 244-257.
- Devas, Nick, (2006). Decentralised Government Finance. University of Birmingham: England.
- Feltenstein, A., dan Iwata, S., (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy and its Costs. Journal of Development Economics. Elsevier: Great Britain.
- Gujarati, D.N., dan Porter D.C., (2009). Basic Econometrics. Fifth Edition, McGraw-Hill Companies: New York.
- Holcombe, Randall, (2006). Public Sector Economics; The Role of Government in The American Economy. Pearson Prentice Hall: New Jersey.
- Hyman, David N., (2008). Public Finance; A Contemporary Application of Theory to Policy. Thomson South-Western: USA.
- Khusaini, M., (2006). Ekonomi Publik; Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPF Universitas Brawijaya: Malang.
- Kuncoro, M., (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga: Jakarta.
- Lin, J., dan Liu Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Journal Economic Development and Cultural Change. Volume 44 hal 1-22.
- Mankiw, Gregory N., (2000). Macroeconomics. Fourth Edition. Worth Publisher: USA.
- Musgrave R. A., and Musgrave P. B., (1989). Public Finance in Theory and Practice. Fifth Edition. McGraw-Hill Companies: New York.
- Mustafa, Usman, (2007). Environmental Fiscal Reforms Through Decentralization for Sustainable Development and Poverty Eradication. The Pakistan Development Review. Part II. Hal. 1087-1103.
- O'Sullivan, Arthur, (2009). Urban Economics. Seventh Edition. McGraw-Hill Companies: New York.
- Rosen, Harvey S., (1995). Public Finance. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies: New York.
- Saragih, J. P., (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sidik, Machfud dkk., (2002) Dana Alokasi Umum; Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Kompas: Jakarta.
- Suwandi, I Made, (2007). Hubungan Pusat dan Daerah dari Aspek Kewenangan: Dalam Koridor UU Nomor 32 Tahun 2004. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi 25 Tahun 2007. MIPI: Jakarta.
- Syaukani (2002). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar Pusat Pengkajian Etika Politik dan pemerintahan: Yogyakarta.

- Tambunan, Tulus T.H., (2001). Transformasi Ekonomi Indonesia; Teori dan Penemuan Empiris. Salemba Empat: Jakarta.
- Ter-Minassian, T., (1997). Fiscal Federalism in Theory and Practice. International Monetary Fund: USA.
- Vazquez, J.M., dan McNab, R.M., (2002). Fiscal Decentralization, Macroeconomic Stability and Economic Growth. International Studies Program Working Paper. Georgia State University : Atlanta.
- \_\_\_\_\_, (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. Journal World Development. Elsevier: Great Britain.
- Weingast, B., (1995). The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development. Journal of Law and Economic Organization. Stanford University: Palo Alto.
- Wibowo, Puji, (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 5 No. 1 Hal. 55 – 83.
- Widhiyanto, Iman, (2008). Fiscal Decentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004). Jurnal Keuangan Publik Vol. 5 No. 1 Hal 19-53.
- World Bank, (2000). Decentralization: Rethinking Government. World Development Report. World Bank: Washington DC.
- \_\_\_\_\_, (2006). Local Governance in Developing Countries. World Bank: Washington DC.
- Zhang, T. dan Zou, H., (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. Journal of Public Economics. World Bank: Washington DC.